

# SEKILAS APBN

## Budget Issues Quick Response

### REALISASI KUR 77,42 PERSEN, LALU BAGAIMANA STRATEGI TAHUN DEPAN?

Adhi Prasetyo



Juli 2023 pemerintah telah melakukan revisi target penyaluran KUR dari semula Rp450 triliun menjadi Rp297 triliun. Meskipun telah disesuaikan, realisasi penyaluran KUR hingga 6 Desember 2023 baru mencapai 77,42 persen dari target yang telah ditetapkan (Kemenkop UKM). Keadaan ini membuat porsi kredit yang diberikan kepada UMKM akhirnya baru mencapai 20,65 persen dari total kredit yang dikucurkan oleh perbankan.

Hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Agustus-Oktober 2023 di 23 provinsi mendapati beberapa bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tidak menaati pedoman penyaluran berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR seperti debitur dikenakan agunan tambahan yang tidak wajar, dana KUR yang diendapkan selama beberapa bulan sebagai jaminan serta adanya tambahan biaya administrasi dan asuransi.

Rasio kredit bermasalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelang berakhirnya masa restrukturasi kredit Covid-19 juga merangkak naik hingga berada pada level 8,33 persen di bulan September 2023. Kenaikan Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM

tersebut diduga akibat kinerja sektor UMKM yang belum mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis, terutama digitalisasi. Selain itu, kualitas produk turut berpengaruh terhadap daya saing pelaku UMKM (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia).

Sebagai catatan di tahun 2024, untuk sementara pemerintah menetapkan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun untuk 12 juta debitur, dimana subsidi bunga KUR pada Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 mendapatkan alokasi 49,3 persen (Rp47,8 triliun) dari total subsidi non energi yang telah ditetapkan sebesar Rp96,9 triliun. Jumlah tersebut naik sebesar Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM agar mampu naik kelas melalui dukungan akses pembiayaan.

Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses kebijakan pembiayaan secara garis besar ialah kemampuan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Hal ini tentu erat hubungannya dengan kompetensi dari SDM UMKM itu sendiri. Dimana salah satu kunci dari penyaluran kredit oleh lembaga pembiayaan adalah aspek legalitas dan catatan keuangan. Guna menghindari pemborosan anggaran subsidi KUR baik karena tidak tepat sasaran maupun tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk lebih concern terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendampingan UMKM. Pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan juga perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dengan memberikan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung tercapainya target 100 persen penyaluran KUR di tahun 2024.